

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Skripsi ini pada mulanya terdorong oleh beberapa literatur terbaru dalam Studi Hubungan Internasional. Literatur dalam Studi Hubungan Internasional konvensional pada awalnya lebih terkait isu-isu politik murni mengenai hubungan antar bangsa seperti perang dan damai, perimbangan kekuatan (*balance of power*), stabilitas tatanan internasional dan lain - lain, para ahli menyebutnya dengan apa yang disebut sebagai *high politic*. Perkembangan lebih lanjut terkait dengan isu-isu lain yang lebih *low politic* seperti isu ekonomi, sosial, budaya HAM. Perkembangan tersebut tentunya terkait dengan perkembangan situasi internasional yang sangat dinamis. Apa yang dibicarakan oleh ilmu pengetahuan tentunya berkorelasi erat dengan objek yang dikajinya, begitu pula sebaliknya. Karenanya tidak dapat disangkal bahwa kompleksitas perkembangan yang terjadi dalam tatanan internasional menjadikan kompleksitas kajian yang terus digali. Dalam dunia sosial saat ini sulit sekali mempertahankan paradigma lama yang reduksionistik dengan anggapan bahwa tatanan internasional (*order*) dapat dikaji dalam satu isu sederhana dan tunggal. Tidak ada yang lebih baik kecuali lebih adaptif terhadap pluralitas wacana, dan tak ada yang dapat bertahan dalam dunia sosial kecuali berdialektika dan menyikapinya dengan bertumpu pada kontekstualitas.

Ilmu Hubungan Internasional memang lebih muda usianya namun perkembangan objek kajiannya yang dinamis membuat akselerasi dalam kematangan teori dan isu yang diangkatnya. Salah satu isu tersebut berkaitan dengan era baru atau *new order* dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan.

Hubungan negara Republik Indonesia dan Amerika Serikat akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang signifikan, pemerintah Indonesia saat ini berusaha untuk meyakinkan pada kongres Amerika Serikat untuk mencabut embargo yang telah diberlakukan oleh Amerika Serikat sejak tahun 1999 berkaitan dengan meletusnya kasus kerusuhan di Timtim selepas jajak pendapat (referendum) yang berujung pada lepasnya provinsi ke-27 Indonesia itu. Saat ini pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berusaha keras untuk meminta pada Amerika Serikat mencabut embargo yang diberlakukan tersebut. Masalah embargo militer menjadi tajuk utama yang diusung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada lawatannya ke Amerika Serikat pada bulan Mei 2005. Lobi politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dilakukan bersama sejumlah menteri dan anggota DPR sejauh ini mengalami beberapa langkah maju. Di antaranya dengan persetujuan pemberian bantuan pendidikan militer bagi perwira TNI atau biasa disebut *International Military Education and Training (IMET)*. Hal tersebut tidak hanya menguntungkan bagi tentara Indonesia, tetapi juga sangat menguntungkan bagi Amerika Serikat, karena pada dasarnya Amerika Serikat memerlukan TNI sebagai teman, apalagi TNI sebagai *back up* demokratisasi. Namun dengan adanya IMET tersebut, tidak secara otomatis para perwira Indonesia berlatih atau

sekolah semua di Amerika Serikat, akan tetapi ada juga yang berlatih Australia dan Inggris secara professional. Walaupun adanya pembukaan kembali IMET, namun sejumlah kalangan menganggap pencabutan larangan embargo militer masih jauh dari kenyataan, walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Bush sepakat untuk membahas secara bertahap isu sensitive tersebut. Keinginan untuk berusaha memperjuangkan pencabutan embargo tersebut bisa dimaklumi, karena sejak diberlakukannya embargo tahun 1999, militer Republik Indonesia praktis kesulitan merawat peralatan militernya. Normalisasi kerjasama militer Republik Indonesia dan Amerika Serikat sangat diharapkan bisa tercipta secepat mungkin. Adanya isu Kongres Amerika Serikat akan mencabut embargo militer terhadap Indonesia pada bulan Oktober 2005 menjadi sebuah topic pembicaraan yang sangat menarik. Penulis akan mengkaji persoalan tersebut dengan tema besar: *“Normalisasi Hubungan Militer Republik Indonesia dan Amerika Serikat, Studi Kasus: Upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Membeli Perlengkapan Persenjataan militer dari Amerika Serikat”* yang setidaknya menurut hemat penulis dapat memberikan gambaran tentang isi skripsi ini.

B. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui sejauh mana sepak terjang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam upaya mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia terutama berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil dengan

pengambilan perlengkapan persenjataan militer dari negara-negara eksportir perlengkapan persenjataan militer.

2. Memahami isu akan dicabutnya embargo militer yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Republik Indonesia sejak tahun 1999.
3. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai manifestasi dari penerapan teori yang pernah penulis dapatkan selama duduk dibangku kuliah.
4. Penulisan skripsi ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk menganalisa fenomena-fenomena kebijakan-kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia yang diambil oleh pemerintah tentang masalah pertahanan dan ketahanan Republik Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sistem militer yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara berkembang.

C. Latar Belakang Masalah

Dinamika dan perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun sejak tahun 1998, cukup memperhatikan. Dalam kurun waktu tersebut, terjadi tiga kali pergantian kepemimpinan nasional yang menggambarkan lembaga kepemimpinan nasional yang rapuh dan tatanan politik yang belum mapan. Lembaga supra dan infra struktur politik masih mencari tatanan politik yang tepat, mencari etika dan sistem politik Indonesia yang memenuhi kebutuhan.

Reformasi yang bertujuan untuk menegakkan kehidupan yang demokratis dan pemerintahan yang bersih dan baik, mendapat rintangan yang berat. Jalan

untuk mencapai tujuan reformasi bertambah panjang. Semangat reformasi lambat laun mulai luntur, penonjolan yang mengemuka hanya retorika dan euphoria reformasi. Kebebasan menyampaikan pendapat acapkali keluar dari norma demokrasi, tidak jarang berkembang dan menyimpang dalam bentuk kebingasan massa yang anarkhis. Usaha sistematis kelompok penekan terus merongrong pemerintah, menimbulkan kegamangan dan menyebabkan posisi pemerintah tidak stabil. Manajemen keamanan nasional menjadi lemah, lambat laun menjadi tidak efektif dalam menegakkan stabilitas keamanan nasional sehingga berpengaruh terhadap kondisi keamanan nasional. Ancaman-ancaman tersebut antara lain: Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri; Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia; Aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri; Konflik komunal, kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi konflik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala yang luas; Kejahatan lintas negara, seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, pencucian uang dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya; Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain; Gangguan keamanan laut seperti pembajakan dan perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, pencemaran dan

perusakan ekosistem; Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara, dan terorisme melalui sarana transportasi udara; Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya; Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa.

Pada hakekatnya kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu sangat penting menjamin tetap tegaknya NKRI yang memiliki wilayah yurisdiksi nasional dari Sabang sampai Merauke. Wilayah negara Indonesia yang terdiri lebih dari 17.500 pulau, memiliki posisi sangat strategis diantara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudra Pasific dan Samudra Hindia. Dengan posisi strategis tersebut, maka berbagai negara khususnya negara-negara besar memiliki kepentingan terhadap kondisi stabilitas keamanan di Indonesia. Implikasi dari kepentingan negara lain tersebut menimbulkan kecenderungan campur tangan atau kepedulian yang tinggi dari negara-negara tersebut terhadap kemungkinan gangguan stabilitas keamanan Indonesia.

Disamping itu, kondisi obyektif Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar (lebih dari 200 juta jiwa) dan tingkat pluralitas yang sangat tinggi (suku, agama, ras dan golongan), mengandung dimensi positif dan negatif.¹ Kondisi obyektif tersebut berpengaruh terhadap upaya pemenuhan kepentingan nasional Indonesia. Oleh sebab itu, dalam berbagai keragaman aspek kehidupan bangsa,

¹ *postmaster@dephan.go.id.5 Agustus 2005*

maka persatuan bangsa dan keutuhan kesatuan wilayah Indonesia merupakan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik tersebut berkembang dalam dua dimensi pemikiran dasar, yakni kewilayahan sebagai suatu realita dan kehidupan masyarakat sebagai suatu fenomena hidup. Perjuangan untuk memenuhi kepentingan nasional tetap berlandaskan pada dua dimensi pemikiran. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka kepentingan nasional Indonesia adalah melindungi kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi keselamatan dan kehormatan bangsa, dan ikut serta secara aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia.

Dengan adanya ancaman-ancaman dan gangguan-gangguan yang mungkin timbul, walaupun negara Indonesia menjunjung tinggi perdamaian, akan tetapi Negara Republik Indonesia berupaya untuk memperkuat pertahanan dan keamanan. Langkah yang diambil antara lain: dengan upaya membeli perlengkapan persenjataan militer dari negara lain, yaitu dengan pembelian pesawat, helikopter, dan sebagainya. Pembelian perlengkapan persenjataan militer tersebut dilakukan dengan berbagai cara. Perlengkapan persenjataan militer tersebut dibeli dari berbagai negara-negara eksportir perlengkapan persenjataan militer. Negara Indonesia pernah membeli perlengkapan persenjataan militer dari Amerika Serikat sebelum embargo militer pada tahun 1999 diberlakukan pada Indonesia, Kongres mengeluarkan larangan pemberian latihan (*training ban*) dan penjualan peralatan persenjataan militer (*weapon ban*) kepada Indonesia setelah

meletusnya tragedi Santa Cruz di Timtim pada 1992.² Ketika itu, terjadi kerusuhan massa yang berujung pada bentrokan berdarah dan mematikan. Hubungan militer Republik Indonesia dan Amerika Serikat memburuk pasca jajak pendapat di Timtim pada 1999. Washington menilai TNI/Polri terlibat dalam pelanggaran HAM di Timtim ketika terjadi kerusuhan saat itu. Karena itu, Amerika Serikat kemudian menjatuhkan embargo militer terhadap Indonesia. William Kohen, Menteri Pertahanan dan Keamanan Amerika Serikat menyampaikan ketetapan embargo senjata terhadap Indonesia pada tanggal 9 September 1999 berdasarkan resolusi nomor 91 dari kongres Amerika Serikat. Embargo senjata diberlakukan untuk semua perlengkapan militer Indonesia³. Perlengkapan militer yang mendapatkan embargo dari Amerika Serikat diantaranya: amunisi, pesawat angkut (C-130), suku cadang pesawat tempur (Jet F-16 *Tiger*, *Hercules*, A-4 *Sky Hawk*), peralatan perang (senjata torpedo jenis *Harpoon*, *alutista* (alat utama sistem senjata), IMET, dan jasa pemeliharaan, pendidikan latihan (*USA FMS: United States Air Force Foreign military Sales*)). ✓

Adanya embargo militer tersebut menjadikan negara Republik Indonesia untuk mencoba menjajaki kerjasama militer dengan negara-negara eksportir perlengkapan persenjataan militer. Eropa bisa dikatakan lebih fleksibel dibandingkan dengan Amerika Serikat sehingga meski ada tentangan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat, pemerintah masih bisa membuka kembali penjualan peralatan ke Republik Indonesia tiga tahun silam. Hanya saja, peralatan dari Eropa seperti *Hawk* dari Inggris tidak bisa dioperasikan optimal karena

² *Kompas*, 28 Mei 2005

³ *Kompas*, Sabtu, 8 Juli 2000

sejumlah sistem kunci jet tersebut mengandung produk / teknologi buatan Amerika Serikat sehingga masih ikut terkena embargo.

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri melakukan terobosan dengan menjajaki kerjasama dalam bidang militer dengan Rusia. Hal ini dilakukan untuk mencari jalan alternatif bagi kebutuhan peralatan persenjataan militer RI. Sebelum embargo militer diberlakukan oleh Amerika Serikat tahun 1999, 80 % orientasi pembelian peralatan persenjataan militer Republik Indonesia ke negara barat. Maka setelah embargo militer diberlakukan sistem persenjataan Republik Indonesia lumpuh dan sistem peralatan militernya lemah. Hal tersebut yang menjadikan Megawati Soekarnoputri melakukan terobosan yang sangat berani. Pembicaraan-pembicaraan untuk terus meningkatkan kerjasama militer dengan Rusia dilakukan. Diantaranya dengan kunjungan kenegaraan Megawati Soekarnoputri ke Rusia pada 21 April 2003. Dalam kunjungannya tersebut Republik Indonesia dan Rusia sepakat melakukan kerjasama teknik dan militer yang lebih erat. Termasuk di dalam kesepakatan itu adalah kemungkinan adanya imbal beli dan kerja sama dalam proyek produksi bersama industri militer.

Pada tanggal 22 April 2003 Republik Indonesia dan Rusia mencapai kesepakatan tentang kontrak pembelian dua pesawat tempur Sukhoi Su-27SK, dua Su -30MK, dan dua helikopter MI35. Pesawat Su-30MK tersebut adalah yang paling mutakhir. Sedangkan Su-27SK juga telah di-upgrade atau disempurnakan sehingga mendekati versi Sukhoi yang paling mutakhir. Pembelian tersebut memang dilakukan saat anggaran Negara terbatas. Akan tetapi, karena peralatan itu sangat dibutuhkan, maka dilakukan dengan mencari sumber penjualan yang

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

bisa dijangkau anggaran Negara. Pembelian empat pesawat Sukhoi sebenarnya belum sepadan untuk membangun peralatan militer Indonesia yang memadai. Itu baru tahap awal, untuk mendapatkan minimal empat skuadron (48 pesawat).

Dalam perkembangannya pembelian pesawat tempur dari Rusia tersebut sempat menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat Republik Indonesia. Semakin tajam Sukhoi dibicarakan, makin hebatlah nama pesawat terbang bikinan Rusia itu. Padahal, dalam persaingan dagang telah memacu teknologi pesawat terbang di dunia internasional menjadi maju begitu pesat. Hebat tidaknya suatu produk tergantung dari kaca mata seseorang melihatnya. Coba lihat pesawat bikinan Amerika Serikat tidak kalah hebatnya, terbukti waktu dipakai menggempur Irak bisa membuat Saddam Husein dan pengikutnya berantakan. Kalau dilihat dari segi kehebatan tentu banyak kriteria pilihan yang bisa dipilih. Pertanyaannya, kenapa harus Sukhoi? Ternyata dibalik rencana pembelian Sukhoi, rupanya Indonesia ingin membuka jalur 'terbang' khusus dalam membuka pasar di Rusia yang potensi penduduknya berjumlah 350 juta orang. Bagi Indonesia negeri beruang itu merupakan peluang pasar yang sangat potensial. Selain itu dengan membeli Sukhoi, Indonesia bisa mendatangkan ahli dari Rusia. Bukankah Indonesia dulu banyak membeli pesawat MIG-17? Pesawat itu sebagian jalan dan sebagian lagi hanya dinonaktifkan saja. Padahal suku cadang pesawat ini masih cukup banyak, tapi sayang yang bisa memasang cuma ahli dari Rusia. Dengan membeli Sukhoi pesawat MIG - 17 yang nonaktif pasti bisa melayang lagi di udara. Ibarat pepatah beli Sukhoi sama dengan sekali

mendayung dua tiga pulau terlampaui. Dengan melihat kenyataan seperti itu, pembelian Sukhoi tidak bisa dipetak-petak begitu saja.

Dikepung oleh realita sulit ini, berupa embargo, keterbatasan dana untuk membeli dari produsen Rusia dan Eropa, Indonesia mencoba membuka peluang lain, dan di sini yang dimaksud adalah China. Salah satu topik yang sempat disinggung dalam pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden China Hu Jintao Senin 25 April 2005 di Jakarta seusai Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia-Afrika adalah kerja sama di bidang pertahanan. Dalam hal ini, Indonesia menyatakan membuka diri terhadap bantuan teknis dari China dalam rangka menuju kemandirian di bidang pengadaan alat utama sistem senjata.

Sejak tahun 2003 China telah melakukan pengkajian terhadap empat industri strategis bidang pertahanan RI, yakni PT DI (pembuat pesawat), PT Pindad (pembuat senjata serbu dan amunisi), PT PAL (pembuat kapal), dan PT Dahana (pembuat bahan peledak). China mengkaji sejauh mana kemampuan produksi dan ekonomi keempat industri tersebut untuk dikembangkan lebih jauh.⁴ Untuk menindaklanjuti kemungkinan kerjasama, Menteri Juwono bersama Menteri Perindustrian Andung Nitimihardja dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman akan mengadakan pembicaraan khusus. Dari DPR, seperti dinyatakan oleh Effendi Choirie dari Komisi I, muncul dukungan terhadap langkah Pemerintah di atas, yang mencoba menggalang kerja sama bidang pertahanan dengan negara di luar Amerika Serikat dan Eropa.

⁴ *Kompas*, 26 April 2005

Setelah komitmen politik di atas dinyatakan, tentu saja ada banyak yang dapat dipelajari dari pengalaman China mengembangkan industri pertahanannya selama ini. Tetapi selain menunggu hasil pengkajian China atas empat industri RI, ada baiknya Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Pertahanan juga secara proaktif menetapkan terlebih dulu apa yang dibutuhkan oleh TNI sekarang dan di masa depan.

Mengamati perkembangan alat-alat pertahanan Republik Indonesia dari masa ke masa, tampaklah jajaran negara pemasok yang berganti-ganti, mengikuti pasang surut politik luar negeri Republik Indonesia. Maklum saja, suplai senjata terkait pula dengan tingkat hubungan antara negara pemasok (*supplier*) dan penerima (*recipient*). Kembali mengingat buku Andrew Pierre, *The Global Politics of Arms Sales*, maka salah satu butir yang selalu dapat diingat adalah bahwa transfer senjata adalah cerminan keadaan hubungan pemasok dan penerima.

Pada perkembangan selanjutnya, seiring dengan perjalanan pemerintahan SBY, walaupun adanya pembicaraan-pembicaraan dengan negara-negara eksportir perlengkapan persenjataan militer, seperti dengan negara-negara Eropa, negara Cina, dan negara eksportir perlengkapan persenjataan militer yang lainnya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih condong mencoba untuk menjajaki kembali kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan dengan negara Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara eksportir perlengkapan persenjataan militer terbesar di dunia, mempunyai banyak peralatan persenjataan militer yang canggih dan serba modern. Dalam perkembangan selanjutnya,

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencoba untuk menormalisasi hubungan militer antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat.

Upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menormalisasi hubungan militer dengan negara Amerika Serikat tercermin dengan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Amerika Serikat pada tanggal 24 Mei 2005 sampai 27 Mei 2005. Masalah embargo militer menjadi tajuk utama yang diusung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika bertemu dengan Presiden George Walker Bush dan Pimpinan Kongres Amerika Serikat, dan juga ketika mengunjungi Parlemen Amerika Serikat atau *House of Representative* yang berasal dari berbagai negara bagian Amerika Serikat.⁵ Sebelum melakukan kunjungan ke Amerika Serikat pada bulan Mei tersebut, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang diwakili oleh Ketua Komisi Pertahanan DPR juga terus mendesak pemerintah Amerika Serikat untuk mencabut embargo senjata militer atas Indonesia.⁶ Upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menormalisasi hubungan militer dengan Amerika Serikat juga ditunjukkan dengan mengirim Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono ke Amerika Serikat pada bulan Maret 2005 untuk melobi pemerintahan Amerika Serikat mengenai pencabutan embargo militer terhadap Indonesia.⁷

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan pertemuan pribadi dengan Patsy Spiers, janda Rick Spiers, warga Amerika Serikat yang menjadi korban penembakan di Timika pada 31 Agustus 2002. Pemerintah Indonesia bisa membuktikan bahwa penembakan terhadap Rick Spiers dan Ted Burton di Timika

⁵ *Liputan6.com* 26 Mei 2005

⁶ *Tempo*, Minggu 16 Januari 2005

⁷ *Tempo*, Kamis 11 Maret 2005

tersebut dilakukan oleh Anthonius Wamang, anggota organisasi Papua Merdeka, dengan adanya temuan ini maka Amerika Serikat mengeluarkan sertifikasi bahwa pemerintah Indonesia telah bertindak kooperatif terhadap inspeksi kasus penembakan yang diduga sebelumnya dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.⁸ Pemerintah Indonesia mengharapkan normalisasi secara penuh embargo senjata yang sejak tahun 1992 diterapkan Pemerintah Amerika Serikat. Langkah untuk normalisasi penuh tersebut tengah diupayakan oleh pemerintah kedua negara sebagai implementasi *joint statement* (pernyataan bersama) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden George W Bush di Washington akhir Mei 2005.⁹ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mengirim sejumlah tokoh Islam ke Amerika Serikat. Berbagai langkah-langkah dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menormalisasi hubungan militer dengan negara Amerika Serikat. Dengan adanya normalisasi hubungan militer secara penuh antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat maka embargo militer yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Republik Indonesia sejak adanya petisi no 91 tanggal 9 September 1999 oleh Kongres Amerika Serikat akan dicabut. Maka dengan adanya pencabutan embargo militer Amerika Serikat terhadap Indonesia, Republik Indonesia bisa kembali membeli peralatan persenjataan militer dari Amerika Serikat. Hal itulah yang diupayakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar bisa kembali membeli perlengkapan persenjataan militer dari Amerika Serikat.

⁸ *detikinet@yahoo.com* 28 Juni 2005

⁹ *Kompas*, 30 Juni 2005

D. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik sebuah pokok permasalahan yaitu :

“Mengapa Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono berupaya membeli perlengkapan persenjataan militer dari Negara Amerika Serikat, dan bukannya tetap mengambil perlengkapan persenjataan militer dari negara Rusia atau negara-negara eksportir perlengkapan persenjataan militer lainnya?”

E. Kerangka Konseptual dan Dasar Teori

Teori Pembuatan Keputusan

Keputusan adalah, dalam istilah David Easton, “output” (keluaran) sistem politik, yang dengan sistem itu nilai-nilai dialokasikan dalam masyarakat secara otoritarian (dengan penggunaan kekuasaan). Konsep pembuatan keputusan telah termuat secara implisit dalam beberapa pendekatan kuno pada sejarah diplomasi dan studi tentang institusi politik. Para psikolog tertarik pada motif-motif yang mendasari keputusan individual dan mengapa sebagian orang mengalami kesulitan yang lebih besar dibandingkan dengan yang lain dalam membuat keputusan. Para ahli ekonomi memfokuskan pada keputusan yang diambil para produsen, konsumen, investor dan mereka-mereka yang pilihannya mempengaruhi perekonomian. Para teoritis administrasi bisnis berusaha menganalisis dan meningkatkan efisiensi pembuatan keputusan eksekutif. Dalam pemerintahan dan khususnya dalam perencanaan pertahanan pada tahun 1960an, teknik yang secara luas dikenal sebagai “*cost effectiveness*” (keefektifan biaya) digunakan dalam

proses pembuatan keputusan, termasuk dalam pembelian persenjataan baru. Pembuatan keputusan merupakan fokus perhatian para ilmuwan politik yang tertarik pada analisis perilaku keputusan para pemberi suara, legislator, pejabat eksekutif, politikus, pemimpin kelompok kepentingan, dan aktor-aktor lain dalam arena politik.¹⁰ Karenanya, studi tentang pembuatan keputusan politik luar negeri mengkonsentrasikan pada satu segmen dari sebuah fenomena minat yang lebih luas bagi para ilmuwan sosial dan pembuat keputusan. Karena banyak analisis memfokuskan perhatian mereka pada pembuatan keputusan dalam situasi krisis.

Pembuatan keputusan adalah sekedar tindakan memilih alternatif yang tersedia yang di situ terdapat ketidakpastian. Dalam politik luar negeri, karena wilayah politik luar negeri biasanya kurang dikenal, jarang terdapat alternatif kebijakan yang kurang "pasti." Alternatif-alternatif tersebut dirumuskan dengan meraba-raba dalam konteks dari suatu situasi keseluruhan dimana akan muncul perselisihan terhadap perhitungan situasi yang mana yang paling valid, pilihan-pilihan apa yang ada, konsekuensi yang muncul dari berbagai pilihan, dan nilai-nilai yang harus digunakan sebagai kriteria untuk membuat ranking pilihan dari yang paling dikehendaki sampai yang paling dihindari. Terdapat kontroversi terhadap hakekat pembuatan keputusan dan terhadap paradigma yang sesuai bagi studi ini.

Menurut model pembuatan keputusan klasik, para pembuat kebijakan membuat sebuah perhitungan dalam dua dimensi dasar manfaat dan kemungkinan dan, dengan asumsi bahwa mereka "rasional," mereka berupaya memaksimalkan

¹⁰ Lihat Paul Wasserman dan Fred S. Silander, *Decision Making: An Annotated Bibliography* (Ithaca, N.Y. : Graduate School of Business and Public Administration, Cornell University, 1958).

manfaat yang diinginkan. Dengan kata lain, setelah semua alternatif yang ada dikaji dan hasil dari nilai serta kemungkinan yang diperkirakan sudah diperoleh, para pembuat keputusan bisa membuat pilihan optimal mereka.¹¹

Menurut Graham T. Allison, sebagian besar analisis politik luar negeri memikirkan dan menjelaskan tentang perilaku pemerintah dalam kerangka model Aktor Rasional atau model "Klasik", di dalam model mana pilihan kebijakan dilihat sebagai tindakan yang sengaja dari pemerintah-pemerintah yang bersatu yang didasarkan pada sarana logis mencapai tujuan-tujuan tertentu. Model ini mewakili sebuah usaha untuk menghubungkan tindakan dengan perhitungan yang masuk akal.¹² Negarawan versi Morgenthau merenungkan apa yang dituntut oleh kepentingan nasional dalam sebuah situasi tertentu, teori permainan Schelling menghitung syarat-syarat *deterrens* yang stabil bagi kedua belah pihak atau titik-titik ketegangan di mana perang-perang terbatas bisa tetap dibuat terbatas, analisis strateginya Herman Kahn memainkan skenario perang nuklir dengan proses matematika perhitungan untung rugi, semuanya menggunakan bentuk model aktor rasional.¹³ Orang yang rasional menjelaskan secara rinci tujuan-tujuan mereka, pilihan-pilihan yang tersedia, dan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari tiap pilihan alternatif sebelum membuat keputusan.¹⁴

¹¹ Lihat misalnya Marshall Dimock, *A Philosophy of Administration* (New York: Harper & Row, 1958), p. 140; J. David Singer, "Inter-nation Influence: A Formal Model," *American Political Science Review*, LXII (June 1963), 424; Bruce M. Russett, "The Calculus of Deterrence," *Journal of Conflict Resolution*, VII (June 1963), 97-109.

¹² Graham T. Allison, *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis* (Boston: Little, Brown, 1971), pp 4-5, 10-11.

¹³ *Ibid.*, pp. 13-18

¹⁴ *Ibid.*, pp. 29-30.

Dalam skripsi yang saya angkat, teori ini sangat berguna terutama dalam menjelaskan kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam masalah pertahanan dan keamanan Republik Indonesia, dalam perkembangan sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia dengan terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia peta pandangan tentang sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia berbeda dengan sistem yang diterapkan oleh Presiden-Presiden terdahulu, begitu juga pandangan tentang kebijakan-kebijakan luar negeri yang akan diambil tentang perlengkapan persenjataan untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan persenjataan demi keamanan dan pertahanan Republik Indonesia.

Untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan persenjataan Republik Indonesia, masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Tidak bisa beroperasinya dengan maksimal pesawat-pesawat buatan Amerika Serikat karena kendala suku cadang yang kurang memadai, menjadikan kurang solidnya serta rapuhnya sistem pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Adanya gangguan-gangguan keamanan di wilayah perbatasan, memerlukan pesawat-pesawat dan perlengkapan persenjataan yang canggih untuk menanggulangnya.

Dengan keadaan seperti itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berupaya untuk mencari jalan memenuhi kebutuhan perlengkapan persenjataan militer dengan cara berusaha mengoptimalkan perlengkapan persenjataan yang selama ini sudah dimiliki, seperti pesawat-pesawat buatan Amerika Serikat. Langkah yang ditempuh oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan cara mencoba

menetralisir hubungan militer Indonesia dan Amerika Serikat, hal tersebut dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendapatkan kembali pasokan perlengkapan persenjataan militer dari Amerika Serikat yang berteknologi tinggi dan super canggih. Banyak manfaat yang akan diperoleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan langkah-langkah yang diambil. Di samping akan mendapatkan pasokan peralatan persenjataan militer kembali, juga para tentara Republik Indonesia dapat kembali mendapatkan bantuan pendidikan dari Amerika Serikat yang sejak tahun 1992 dihentikan. Keuntungan lain yang bisa diperoleh dengan mendapatkan pasokan perlengkapan persenjataan militer dari Amerika Serikat yaitu Republik Indonesia bisa mendapatkan suku cadang bagi pesawat-pesawat buatan Amerika Serikat yang sudah lama tidak beroperasi.

Keuntungan-keuntungan yang lain dengan adanya peningkatan hubungan militer antara Republik Indonesia dengan Amerika Serikat yaitu Republik Indonesia dapat meningkatkan hubungan di sektor yang lain, seperti dalam sektor migas dan kelistrikan dan juga sektor-sektor yang lain. Sektor yang lain yaitu dalam sektor kebudayaan, pariwisata, perdagangan, dll.

Dengan adanya uraian tersebut, maka teori ini sangat jelas berguna bagi skripsi yang akan dikaji. Teori aktor rasional, teori yang mengoptimalkan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dalam pengambilan suatu keputusan. Keputusan-keputusan Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali berupaya membeli peralatan persenjataan militer dari Amerika Serikat sangat tepat karena dengan keputusan tersebut Susilo Bambang Yudhoyono akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar.

F. Hipotesa

Dari pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas dan dengan didukung oleh teori-teori yang dianggap dapat membantu analisa, maka penulis mengajukan hipotesa: Upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membeli peralatan persenjataan militer dari Amerika Serikat lagi, disebabkan:

1. Teknologi perlengkapan persenjataan militer Amerika Serikat yang modern dan canggih akan lebih memperbaiki penampilan militer Republik Indonesia.
2. Upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membeli perlengkapan persenjataan dari Amerika Serikat memberi banyak keuntungan bagi Republik Indonesia, antara lain: investasi ekonomi dan perdagangan.

G. Jangkauan Penulisan

Dalam membahas masalah tersebut, untuk menjaga kedisiplinan penulis terhadap masalah yang diangkat, penulis membatasi jangkauan penelitian ini pada isu kebijakan-kebijakan luar negeri yang diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang perlengkapan persenjataan militer Republik Indonesia berkaitan dengan embargo militer yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap Republik Indonesia.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode deduksi, yaitu teori yang digunakan sebagai dasar analisa untuk kemudian di peroleh sebuah kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Sedangkan pendekatan penelitian

bersifat deskriptif kualitatif, yaitu analisis hanya sampai pada taraf deskripsi dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat, sudah dipahami dan disimpulkan. Penekanannya pada usaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentatif¹⁵.

Sedangkan metodologi pengumpulan data dilakukan dengan cara pengumpulan data pustaka. Data pustaka diperlukan untuk menggali dasar-dasar teoritik dan pembedahan awal permasalahan yang diteliti. Tidak menutup kemungkinan ditemukan literatur berkenaan dengan obyek penelitian seperti buku- buku, makalah, jurnal, koran, "website" internet atau sumber bacaan lainnya.

I. Kerangka Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Termasuk didalamnya Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Konseptual dan Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penulisan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Kerangka Penulisan.

Bab II : DINAMIKA HUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

- A. Perjalanan hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Amerika Serikat
- B. Hubungan Republik Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang pertahanan dan keamanan

¹⁵ Syaifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal. 11

**Bab III : PERKEMBANGAN PERLENGKAPAN PERSENJATAAN
MILITER RI SEBELUM DAN PASCA EMBARGO AMERIKA SERIKAT**

- A. Diberlakukannya Embargo Militer Amerika Serikat Terhadap Republik Indonesia tahun 1999
 - A.1. Sebab-Sebab Embargo Amerika Serikat diberlakukan pada Republik Indonesia
 - A.2. Dampak Embargo Militer Amerika Serikat terhadap Republik Indonesia
- B. Dari embargo militer 1999 diberlakukan oleh Amerika Serikat sampai Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
- C. Kontroversi Pembelian Perlengkapan Persenjataan Militer Dari Rusia Oleh Megawati Soekarnoputri

**Bab IV : UPAYA PRESIDEN SBY MEMBELI PERLENGKAPAN
PERSENJATAAN MILITER DARI AS**

- A. Kaitan antara Kecanggihan Persenjataan Militer Amerika Serikat dan Upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Membeli Perlengkapan Persenjataan Militer dari Amerika Serikat
- B. Dampak Rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membeli Perlengkapan Persenjataan Militer Dari Amerika Serikat terhadap sektor-sektor ekonomi perdagangan Republik Indonesia

Bab V : KESIMPULAN